

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ PENERIMAAN ASAS TUNGGAL PANCASILA OLEH NAHDLATUL ULAMA: Latar Belakang dan Proses 1983-1985” membahas penerimaan dan argumentasi Nahdlatul Ulama (NU) terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila. Masalah utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah “Bagaimana penerimaan asas tunggal Pancasila oleh NU”. Masalah utama tersebut kemudian dibagi menjadi enam pertanyaan penelitian, yaitu (1) Apa latar belakang pemerintahan Orde Baru menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila. (2) Bagaimana implementasi Pancasila sebagai asas tunggal dan reaksi dari individu dan organisasi massa terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila. (3) Bagaimana dinamika internal di organisasi NU terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila. (4) Apa latar belakang Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai asas organisasi. (5) Mendeskripsikan proses penerimaan asas tunggal Pancasila dalam organisasi NU. (6) Bagaimana dampak penerimaan asas tunggal Pancasila terhadap organisasi NU. Untuk mengkaji masalah tersebut digunakan metode historis dan teknik penulisan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kebijakan pemerintah terhadap Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan didorong oleh dua latar belakang yaitu ideologis dan politis. Kebijakan ini dimasukkan dalam ketetapan MPR No. II/1983 (pasal 3 bab IV). Tanggal 19 Februari 1985, pemerintah mengeluarkan UU No.3/1985, menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan UU No. 8/1985 tentang ormas, menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Reaksi yang menolak dan menerima terhadap kebijakan pemerintah tersebut datang dari berbagai individu muslim dan organisasi sosial, salah satunya NU. Isu penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas Papol dan Golkar menggelinging bak bola salju. Pada saat itu terjadi perseteruan antara kubu Cipete (kubu politisi) vs Situbondo (kubu ulama), keduanya bermaksud menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Kubu Situbondo memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membuat seluruh anggota NU menuruti tuntutan pemerintah. Hal ini diperkuat oleh dukungan pemerintah yang memberikan sepenuhnya kepada kubu Situbondo untuk mengadakan Munas. NU memutuskan menerima Pancasila berdasarkan tiga pertimbangan yaitu Pertama, NU menganut pendirian bahwa Islam adalah agama fitriah, Kedua, konsep ketuhanan Pancasila dinilai mencerminkan tauhid menurut keimanan Islam. Ketiga, dari sudut sejarah bahwa NU dengan cara mereka sendiri turut berjuang merebut kemerdekaan sebagai kewajiban keagamaan. Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo memutuskan memantapkan Pancasila sebagai asas organisasi, penjabarannya dalam Anggaran Dasar serta deklarasi hubungan Pancasila dan Islam. Pada Muktamar NU yang ke-27 tahun 1984 di Situbondo diputuskan NU menerima asas tunggal Pancasila. Sebagai implementasi penerimaan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka asas NU berubah dari Islam menjadi Pancasila, oleh karena itu sikap pemerintah kemudian berubah, menganggap NU tidak oposan lagi.

ABSTRACT

Based on the research results can be explained that the government policy of Pancasila as the sole foundation for all political parties and civil society organizations is driven by two background is ideological and political. This policy is included in the provisions of Decree No.. II/1983 (article 3 of chapter IV). Dated February 19, 1985, the government issued Law No.3/1985, stipulates that political parties and Golkar should accept Pancasila as their sole foundation. On June 17, 1985, the government issued Law no. 8/1985 on organizations, to set that all social organizations or mass must include the Pancasila as their sole foundation. Reactions were rejected and accept the government's policy has come from various Muslim individuals and social organizations, one of which NU. The issue of application of Pancasila as the sole foundation and Golkar political party like a snow ball rolling. By the time that happens the feud between Cipete group (camp politicians) vs Situbondo (ulama faction), they intend to organize the National Conference (National Conference). Group Situbondo have a better chance to make all the demands of the government of NU members. This was confirmed by the government that gives full support to the camp Situbondo to hold a national conference. NU decided to accept the Pancasila based on three considerations, namely the First, NU adopted the view that Islam is a religion fitriah, Second, the concept of God reflects the unity of Pancasila assessed according to the Islamic faith. Third, from the angle that NU history in their own way helped fight for independence as a religious obligation. NU Ulama National Conference 1983 in Situbondo decided to establish the Pancasila as the foundation of the organization, explanation in the Articles of Association as well as the declaration of the relationship Pancasila and Islam. In Congress NU's 27 th 1984 in Situbondo decided NU accept Pancasila. As the implementation of the principle of acceptance only in the life of the nation NU turned the principles of Islam to Pancasila, therefore, the government's attitude later changed, assume NU opponents no longer.